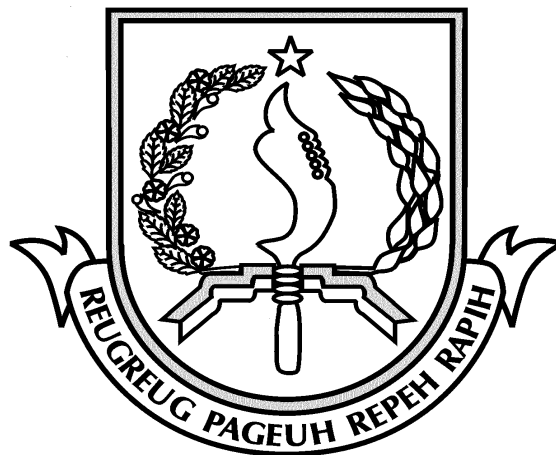


**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LAKIP)**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL  
KOTA SUKABUMI TAHUN 2009**



**DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN CATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI  
JL. PELABUHAN II KM 5 NO. 627 TELP. 218268**

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dalam pelayanan dan mekanisme untuk mendokumentasikan atau mengadministrasikan Dokumen Kependudukan saat ini telah diberlakukan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 ini maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Perlu juga diinformasikan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi, maka

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil berubah status menjadi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi Tahun 2008-2013 dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- e. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- f. Instruksi Menteri Nomor 77 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;

- h. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2009 adalah :

1. Dapat diketahuinya kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Dapat diketahuinya perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;
4. Tertibnya pengadministrasian hasil kegiatan;
5. Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada publik.

### **1.4. Gambaran Umum Organisasi**

Berdasarkan Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

Adapun Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi adalah:

- a. perumusan Kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan catatan sipil;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi merupakan salah satu lembaga teknis di bidang kependudukan dan catatan Sipil dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

### **1.5. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan**

Selanjutnya dapat dilihat Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan, seperti berikut ini :

#### **1. Kondisi Kepegawaian**

Susunan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi berjumlah 21 orang, yaitu :

a. Kepala Dinas	:	1 orang
b. Sekretaris	:	1 orang
c. Kepala Bidang Kependudukan	:	1 orang
d. Kepala Bidang Catatan Sipil	:	1 orang
e. Ka Sub Bag Umum & Kepeg	:	1 orang
f. Ka Sub Keuangan	:	1 orang
g. Ka Sub Perencanaan	:	1 orang
h. Kepala Seksi Pendafduk	:	1 orang
i. Kepala Seksi Pengendalian Duk	:	1 orang
j. Kepala Seksi Mon, Eval, & Data	:	1 orang
k. Kepala Seksi KKPP	:	1 orang
l. Kepala Seksi PPA PA & PPL	:	- orang
m. Kepala Seksi Inf. & Penylhn	:	1 orang
n. Pelaksana	:	9 orang
o. Kel. Jabatan Fungsional	:	- orang

#### **2. Sarana & Prasarana**

Kondisi sarana dan prasarana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, yaitu memiliki sebuah gedung kantor yang terletak di Jl. Pelabuhan II KM 5 No. 627 Nomor Telepon 218268, dan prasarana yang dimiliki diantaranya :

a. Server	:	3	buah
b. Komputer	:	17	buah
c. Printer	:	21	buah
d. Scanner	:	2	buah
e. Meja Tulis	:	22	buah
f. Kursi Sice	:	3	buah
g. Kursi Putar	:	11	buah
h. Lemari	:	8	buah
i. Roll Opek	:	1	buah
j. Filling Kabinet	:	2	buah
k. Mesin Tik	:	3	buah
l. Faximile	:	1	buah
m. Pesawat Telepon	:	1	buah
n. Camera (Canon)	:	8	buah
o. Web Camera	:	8	buah
p. Kendaran bermotor:			
- Roda empat	:	1	buah
(Toyota Avanza)			
- Roda dua	:	4	buah
(Honda Win Tahun 2002, Honda Legenda Tahun 2002, Honda Fit Tahun 2005, Suzuki Smash Tahun 2007)			

## **1.6. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2009, adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Gambaran Umum Organisasi
- 1.5. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan
- 1.6. Sistematika Penulisan

## BAB II RENCANA STRATEJIK DAN RENCANA KINERJA

- 2.1. Rencana Strategik
  - 2.2.1. Visi
  - 2.2.2. Misi
  - 2.2.3. Tujuan
  - 2.2.4. Sasaran
  - 2.2.5. Strategi Pencapaian
- 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2009

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2009

- 3.1. Pengukuran Pencapaian Sasaran
- 3.2. Pengukuran Kinerja Kegiatan
- 3.3. Aspek Keuangan
- 3.4. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas
  - 3.4.1. Evaluasi
  - 3.4.2. Analisis Akuntabilitas

## BAB IV PENUTUP

- 4.1. Tinjauan Umum Keberhasilan
- 4.2. Permasalahan atau Kendala yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja
- 4.3. Strategi Pemecahan Masalah

## LAMPIRAN

## **BAB II**

### **RENCANA STRATEJIK DAN RENCANA KINERJA**

#### **2.1. RENCANA STRATEJIK**

Rencana Strategik adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kota Sukabumi dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2008 – 2013.

Untuk mewujudkan Rencana Strategik tentu perlu ditunjang oleh Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, yaitu :

##### **2.1.1. Visi**

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 yaitu : **“TERWUJUDNYA KOTA SUKABUMI SEBAGAI PUSAT PELAYANAN BERKUALITAS BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PERDAGANGAN DI JAWA BARAT BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”**.

Sedangkan Visi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi, Tahun 2008-2013 yaitu :

**“DENGAN IMAN DAN TAQWA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG AMANAH BERPARADIGMA**

**SURGAWI MENUJU KOTA SUKABUMI YANG CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA (dilandasi Nilai Filosofis Shiddiq, Amanah, Fathanah dan Tabligh)”.**

Dengan mengacu kepada Visi Kota Sukabumi, Walikota & Wakil Walikota Sukabumi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi memiliki Visi:

**“TERWUJUDNYA SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG TERTIB, AKURAT DAN DINAMIS”.**

Visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi dapat diuraikan secara ringkas seperti berikut ini :  
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari:

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan pendataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam registrasi pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.

Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan yang ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas tersebut tentu ada harapan yang ingin diwujudkan, yaitu :

1. Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertib;  
Yaitu dalam melaksanakan kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu menjalankan tahapan atau prosedur yang berlaku, tidak melewati tahapan yang sudah ditentukan, dan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku. Misalnya dalam pendaftaran penduduk harus ditangani mulai dari tingkat RT, RW,

Kelurahan, Kecamatan, baru ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

2. Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akurat;

Yaitu dalam melaksanakan kegiatan pencatatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, data yang ada dan yang diberikan itu harus benar, tidak memberikan data palsu dan tidak memanipulasi data, sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

3. Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dinamis;

Yaitu dalam melaksanakan sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil data yang ada itu harus mengikuti perkembangan waktu terakhir, sehingga perubahannya kelihatan setiap waktu, apakah data yang ada itu statis atau tidak, atau misalkan dokumen yang dimiliki masih berlaku atau tidak.

Apabila Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertib, akurat dan dinamis, maka dalam penyusunan rencana pembangunan dan dalam menentukan kebijakan pembangunan akan berjalan dengan baik dan lancar.

### **2.1.2. Misi**

Guna mewujudkan Visi tersebut terdapat **Misi** yang harus dilaksanakan, yaitu:

Misi Kota Sukabumi :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang beriman, bertaqwa, dan berbudaya.
2. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas.
3. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
4. Mewujudkan pengembangan perdagangan dan sektor lapangan usaha lainnya yang berdaya saing tinggi.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur pemerintahan daerah yang profesional dan amanah.
6. Mewujudkan Kota Sukabumi yang nyaman dan indah.

Misi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi :

1. Mewujudkan nilai-nilai agama, sosial dan budaya.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan aparatur yang profesional dan religius (Good Governance dan Clean Government)
3. Mewujudkan kualitas pelayanan publik dalam bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan dan sektor lainnya.

Sedangkan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, yaitu :

**“MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT DALAM BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL”**

Untuk mewujudkan Misi ini ada beberapa faktor pendukung yang perlu dilakukan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan aparatur terhadap tuntutan masyarakat dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Aparatur yang terlibat dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan aparatur yang mampu dan konsisten dalam penanganan Dokumen Kependudukan karena dengan kualitas aparatur yang baik, maka kegiatan pelayanan akan berjalan dengan lancar.
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi atau SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk melaksanakan penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia secara bersamaan dan dimanfaatkan oleh seluruh Kabupaten/Kota yang ada di

Indonesia, walaupun belum seluruhnya memanfaatkan teknologi tersebut karena satu dan lain hal.

3. Meningkatkan penyebarluasan informasi, kepedulian, dan peran serta masyarakat dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Masyarakat belum semuanya mengetahui tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karena itu perlu diadakan penyebarluasan informasi tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap kesempatan, agar pengetahuan dan wawasan masyarakat meningkat dan menindaklanjutinya. Dan selanjutnya warga masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan peran sertanya dalam penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena tanpa kepedulian dan peran serta masyarakat tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu harus diupayakan bagaimana agar masyarakat mau peduli dan berperan serta dalam penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Meningkatkan kerjasama dengan pihak yang berwenang. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan program yang harus ditangani oleh berbagai pihak. Oleh sebab itu perlu adanya kerjasama dengan pihak yang berwenang dan terkait dengan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### **2.1.3. Tujuan**

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat Tujuan Misi yang harus dicapai, yaitu : **"TERWUJUDNYA KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN"**.

Berusaha seoptimal mungkin dalam memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan dalam pembuatan Dokumen Kependudukan.

#### **2.1.4. Sasaran**

Adapun sasaran dari pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu :

**"TERSEDIANYA DOKUMEN KEPENDUDUKAN YANG EFEKTIF".**

Pengertian Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Sedangkan pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.

#### **2.1.5. Strategi Pencapaian**

Untuk mensukseskan kegiatan yang dilaksanakan diperlukan Strategi Pencapaian, terbagi :

##### **1. Kebijakan**

Kebijakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, yaitu : Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan.

##### **2. Program Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yaitu ;**

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan;
- b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

## 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2009

Dalam Rencana Kinerja Tahunan SKPD terdapat Sasaran yang ingin dicapai, yaitu : Tersedianya Dokumen Kependudukan yang efektif, dengan indikatornya sebagai berikut :

1. Masyarakat yang memiliki Akta Kelahiran, target 83%.
2. Masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga, target 74%.
3. Masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk, target 68%.

Adapun Program yang wajib dilaksanakan untuk Strategi Pencapaian, yaitu :

- 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan, yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu;
  - b. Implementasi SIAK (membangun, up dating dan pemeliharaan);
  - c. Pembentukan dan penataan system koneksi;
  - d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan;
  - e. Sosialisasi kebijakan kependudukan;
  - f. Penyediaan jasa komunikasi.
- 2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  - b. Penyediaan jasa kebersihan;
  - c. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor;
  - d. Penyediaan alat tulis kantor;
  - e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  - f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor;
  - g. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan;
  - h. Penyediaan makanan dan minuman;
  - i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pemeliharaan berkala/rutin gedung kantor;
  - b. Pemeliharaan berkala/rutin kendaraan dinas operasional.

- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
  - b. Penyusunan laporan akhir tahun.

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2009**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

Pada pembahasan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2009 ini ada 4 aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS);
2. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK);
3. Keuangan;
4. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

<input type="checkbox"/> 90 - 100	=	Amat baik
<input type="checkbox"/> 80 - 89	=	Baik
<input type="checkbox"/> 50 - 79	=	Cukup baik
<input type="checkbox"/> < 49	=	Kurang

Penjelasan lebih lanjut untuk keempat aspek tersebut, adalah sebagai berikut :

### **3.1. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN**

Pengukuran Pencapaian Sasaran adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran dan pencapaian target Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Berdasarkan pada Matriks Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), maka dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan untuk masyarakat yang memiliki Akta Kelahiran dicapai 100,02% atau baik, untuk masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga (KK) dicapai 102,43 atau baik, sedangkan untuk masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari penduduk wajib KTP dicapai 101,75 % atau baik. Sehingga secara umum dapat disebutkan bahwa sasaran tersebut dapat dicapai **baik**.

Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran dapat dilihat pada tabel IV sebagaimana terlampir.

### **3.2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN**

Pengukuran Kinerja Kegiatan untuk mengetahui tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari masing-masing kelompok kinerja kegiatan.

Berdasarkan pada Matriks Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) maka dapat diketahui bahwa Tingkat Pencapaian Target (Rencana Tingkat Capaian) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dilihat dari masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan adalah 100 % dibandingkan dengan kegiatan yang ada, atau semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan **baik**.

Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok kinerja kegiatan dapat dilihat pada tabel III sebagaimana terlampir.

### 3.3. ASPEK KEUANGAN

Anggaran untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada Tahun Anggaran 2009, yaitu :

- a. Target pendapatan untuk Tahun 2009 adalah Rp **523.590.000,-** dicapai sebesar **Rp. 570.560.000,-** atau dicapai sebesar **108,97%** dari target.

Tabel target dan realisasi pendapatan dan belanja dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2009**  
**dan dibandingkan Dengan Tahun 2008**

<b>No</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Selisih Lebih / Kurang (Rp)</b>	<b>%</b>
1	KTP	430.000.000	421.000.000	-9.000.000	97,91
2	KK	79.200.000	106.662.000	27.462.000	134,47
3	Akte Kelahiran :				
	a. istimewa	0	20.180.000	20.180.000	100,00
	b. Tambahan	0	9.960.000	9.960.000	100,00
	c. Kutipan Kedua	375.000	150.000	-225.000	40,00
4	Akta Perkawinan :				
	a. Di dalam Dinas	4.125.000	2.975.000	-1.150.000	72,12
	b. Di luar Dinas	5.500.000	4.375.000	-1.125.000	79,54
	c. Kutipan Kedua	375.00	0	-375.000	-100,00
5	Akta Perceraian	700.000	400.000	-300.000	57,14
6	Akta Kematian	1.350.000	1.530.000	180.000	113,33
7	Pengakuan dan pengesahan Anak	1.500.000	1.200.000	-300.000	80,00
8	Surat Ket. Pindah	375.000	2.128.000	1.753.000	567,47
9	Perubahan Nama	90.000	0	-90.000	-100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>523.590.000</b>	<b>570.560.000</b>	<b>46.970.000</b>	<b>108,97</b>
	Tahun 2008	546.605.000	746.705.000	200.100.000	136,61
	Lebih/Kurang	23.015.000	176.145.000	153.130.000	27,64

Apabila dibandingkan antara tahun 2009 dan tahun 2008 dengan memperhatikan tabel di atas dapat dilihat bahwa tahun 2009 terdapat penurunan target dan pencapaiannya, hal ini disebabkan oleh tidak adanya pungutan retribusi (gratis) untuk masyarakat yang akan membuat Kutipan Akta

Kelahiran, sehingga terjadi penurunan yang cukup signifikan walaupun untuk tahun 2009 ini pencapaiannya bisa melebihi target yang sudah ditentukan atau 108,97%.

- b. Sedangkan untuk belanja dari anggaran **Rp. 2.112.250.000,-** ternyata dana yang digunakan adalah **Rp. 2.122.950.765,-** atau menggunakan anggaran **100,51%**.

Untuk belanja tidak langsung, dari anggaran dana yang ada, direalisasikan sebesar 107,49%, sedangkan untuk belanja langsung dari anggaran dana yang ada, direalisasikan sebesar 95,85%.

Selanjutnya dapat dilihat anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada Tahun Anggaran 2009 dan dibandingkan dengan tahun 2008, seperti berikut ini :

**Tabel 3.2**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan**  
**Belanja Langsung Tahun 2009 dan**  
**Dibandingkan dengan Tahun 2008**

No	Belanja	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Selisih Lebih / Kurang	%
<b>1.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>845.055.000</b>	<b>908.334.601</b>	<b>63.279.601</b>	<b>107,49</b>
	Belanja Pegawai	845.055.000	908.334.601	63.279.601	107,49
<b>2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.267.195.000</b>	<b>1.214.616.164</b>	<b>-52.578.836</b>	<b>95,85</b>
	a. Belanja Pegawai	375.069.000	355.461.075	-19.607.925	94,77
	b. Belanja Barang dan Jasa	806.736.000	773.765.089	-32.970.011	95,91
	c. Belanja Modal	85.390.000	85.390.000	-	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.112.250.000</b>	<b>2.122.950.765</b>	<b>10.700.765</b>	<b>100,51</b>
	Belanja Tidak Langsung Tahun 2008	465.995.000	514.414.065	48.419.065	110,39
	Lebih / Kurang	379.060.000	393.920.536	14.860.536	-2,90
	Belanja Langsung Tahun 2008	1.047.286.000	1.023.966.030	-23.319.970	97,77
	Lebih / Kurang	219.909.000	190.650.134	-29.258.866	-1,92
	Jumlah Tahun 2008	1.513.281.000	1.538.380.095	25.099.095	101,66
	<b>Lebih / Kurang</b>	<b>598.969.000</b>	<b>584.570.670</b>	<b>-14.398.330</b>	<b>-1,15</b>

Dengan memperhatikan tabel di atas dapat dilihat bahwa, apabila dilihat angka absolut untuk dana yang digunakan dari tahun 2008 ke tahun 2009 terdapat peningkatan anggaran yang cukup besar, namun apabila diperhatikan dari selisih dan persentase anggaran terdapat penurunan anggaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan untuk tahun 2009 ini disebut **efektif dan efisien**.

### 3.4 EVALUASI dan ANALISIS AKUNTABILITAS

#### 3.4.1. Evaluasi

Berdasarkan pada hasil perhitungan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang telah dilakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaksanakan pelayanan untuk Tahun Anggaran 2009 dikategorikan berhasil dengan **baik**.

Selain itu sebagai bahan evaluasi terdapat pula target untuk : Akta Kelahiran, pembuatan Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.3**  
**Target dan Realisasi Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Tahun 2009 dan Dibandingkan Dengan Tahun 2008**

No	Uraian	Perbandingan Tahun 2009 dan 2008	Target (%)	Realisasi (%)	%
1.	Masyarakat yang memiliki Akta Kelahiran	Tahun 2009	83	83,02	100,02
		Tahun 2008	81,54	81,54	100,00
		<b>Lebih / Kurang</b>	<b>1,46</b>	<b>1,48</b>	<b>0,02</b>
2.	Masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga	Tahun 2009	74	75,80	102,43
		Tahun 2008	72,56	72,56	100,00
		<b>Lebih / Kurang</b>	<b>1,44</b>	<b>3,24</b>	<b>2,43</b>
3.	Masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk	Tahun 2009	68	69,19	101,75
		Tahun 2008	66,89	69,89	100,00
		<b>Lebih / Kurang</b>	<b>1,11</b>	<b>-0,7</b>	<b>1,75</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ketiga aspek di atas semuanya melebihi target. Dalam pembuatan Akta Kelahiran, dari jumlah penduduk Kota Sukabumi yaitu 282.367 jiwa sudah 234.421 jiwa yang membuat Akta Kelahiran atau 83,02% atau 100,02% dari target yang ada. Untuk pembuatan Kartu Keluarga dari Kepala Keluarga yang ada yaitu 71.937 KK baru 54.531 KK yang telah memiliki KK atau dicapai 75,80% atau

102,43% dari target yang ada. Sedangkan untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk dari seluruh penduduk yang ada dan wajib KTP yaitu 218.260 jiwa terdapat 151.004 jiwa yang telah memiliki KTP atau dicapai 69,19% atau 101,75% dari target yang ada.

Untuk ketiga target tersebut yaitu masyarakat yang memiliki Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, tercapai target malahan melebihi target. Hal ini disebabkan sosialisasi yang terus menerus dilaksanakan setiap tahun, juga didukung adanya pengaruh Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, juga pembagian Liquid Petroleum Gas (LPG), dimana salah satu syarat peserta Pemilu atau masyarakat penerima LPG harus memiliki KTP, sehingga warga masyarakat berbondong-bondong untuk membuat KTP.

Apabila dibandingkan antara tahun 2009 dengan tahun 2008 menunjukkan adanya kenaikan walaupun kenaikan tersebut tidak begitu signifikan. Untuk masyarakat yang memiliki kutipan akta kelahiran (tahun 2008 masyarakat yang memiliki kutipan akta kelahiran adalah 229.114 jiwa dari penduduk 280.983 jiwa) dan untuk masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga (Tahun 2008 masyarakat yang memiliki KK adalah 51.033 dari 70.332 KK yang ada) menunjukkan kenaikan, namun untuk masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (tahun 2008 masyarakat yang memiliki KTP adalah 151.507 jiwa dari 208.802 jiwa wajib KTP) walaupun dari angka absolut nilainya naik namun jika dibandingkan realisasi persentasenya terdapat penurunan sebesar 0,7 persen

#### **3.4.2. Analisis Akuntabilitas**

Dengan menggunakan cara perhitungan analisis efektifitas dan efisiensi, hasilnya dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.4**  
**Tabel Analisis Akuntabilitas Tahun 2009 dan**  
**Dibandingkan Dengan Tahun 2008**

No	Kegiatan	Efek-Tifitas (2009/2008)	Efi-Siensi (2009/2008)
1. D	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	V/V	V/X
2.	Implementasi SIAK (membangun, up dating dan pemeliharaan)	V/V	V/V
3.	Pembentukan dan penataan sistem koneksi (NIK)	V/V	V/V
4.	Sosialisasi kebijakan kependudukan	V/V	V/V
5.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	V/V	V/V
6.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	V/V	V/V
7.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	V/V	V/V
8.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	V/V	V/V
9.	Penyediaan alat tulis Dinas	V/V	V/V
10.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	V/V	V/X
11.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	V/V	V/V
12.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	V/V	V/V
13.	Penyediaan makanan dan minuman	V/V	V/V
14.	Rapat-rapat koordinasi keluar daerah	V/V	V/X
15.	Pemeliharaan berkala/rutin gedung kantor	V/V	V/V
16.	Pemeliharaan berkala/rutin kendaraan Dinas/operasional	V/V	V/X
17.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	V/-	V/-
18.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	V/-	V/-

Dengan memperhatikan tabel di atas dapat dilihat bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi Tahun 2009 dilaksanakan 100% atau efektif dan efisien.

Dengan demikian dapat disampaikan bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi dapat dilaksanakan dengan baik tanpa menghadapi kendala yang berarti, atau semua kegiatan yang dilaksanakan dapat dicapai dengan baik.

Demikian juga apabila dibandingkan dengan tahun 2008 terdapat peningkatan efisiensi, yaitu untuk tahun 2008 terdapat 4 (empat) kegiatan yang tidak efisien, namun untuk Tahun 2009 semua kegiatan dilaksanakan dengan efisien.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN**

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi sebagai instansi teknis yang melayani kegiatan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, selalu berusaha untuk memanfaatkan sumber dana dan sarana yang ada dengan baik, dan berusaha melaksanakan tugas seoptimal mungkin.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi sebagai pelaksana atau instansi teknis telah melaksanakan tugas/kegiatan, baik kegiatan yang didanai seperti yang telah di sampaikan di atas, maupun kegiatan yang tidak didanai sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi.

Dengan memperhatikan paparan yang disampaikan pada point-point sebelumnya, tingkat keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara umum dapat dikatakan berhasil, karena semua target yang ada dapat dicapai dengan baik. Pernyataan tersebut didukung oleh :

- a. Pendapatan melebihi target yang sudah ditentukan yaitu 108,97% atau baik;
- b. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai 100,02% untuk masyarakat yang memiliki Akta Kelahiran, 102,43% untuk masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga dan 101,75% untuk masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- c. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dicapai 100 % untuk semua kegiatan atau dilaksanakan dengan efektif dan efisien;
- d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi menggunakan dana melebihi anggaran atau 100,51% dari anggaran yang disediakan.

#### **4.2. PERMASALAHAN ATAU KENDALA YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA**

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan, diantaranya :

- a. Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui dan menyadari pentingnya Dokumen Kependudukan, dan sebagian masyarakat masih ada yang berpendapat bahwa kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran hanya diperuntukan bagi anak-anak yang mau bersekolah atau bekerja;
- b. Sistem pembuatan KTP Nasional tidak bisa diwakilkan kepada orang lain dalam proses pembuatannya, karena harus di foto langsung di tingkat Kecamatan;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa Dokumen Kependudukan diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana, maka penerbitan KK dan KTP tidak bisa selesai saat itu sebab proses pembuatannya masih di Kecamatan sementara penandatanganan dilaksanakan oleh Kepala Dinas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi.

#### **4.3. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH**

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut, adalah:

- a. Melaksanakan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat melalui Ketua RT dan RW tentang pentingnya Dokumen Kependudukan;
- b. Mencetak Buku Panduan tentang Dokumen Kependudukan dan Buku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Menghimbau masyarakat akan pentingnya Dokumen Kependudukan melalui radio;
- d. Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi agar lokasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berada

dipusat Kota Sukabumi dan pelayanan Dokumen Kependudukan dilaksanakan satu atap (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil).

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2009 untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja berikutnya.

Sekian dan terima kasih.

Sukabumi, 19 Januari 2009  
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kota Sukabumi,

**Hi. ANNA SETIANA, SH**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19560901 197603 2 002

**Tabel IV**  
**Pengukuran Pencapaian Sasaran**  
**Tahun 2009**

**Instansi** : **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	% Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1. Tersedianya dokumen kependudukan yang efektif	Masyarakat yang memiliki Akta Kelahiran	%	83	83.02	100,02	
	Masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga	%	74	75.8	102,43	
	Masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk	%	68	69.19	101,75	

Sukabumi, 19 Januari 2010  
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kota Sukabumi

Hj. ANNA SETIANA, SH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19560901 197603 2 002

83 58.48 70.45783

74 78.8 106.4865

68 69.19 101.75